



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IDING SOLEHUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **155048**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.689.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/54 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/54 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m²/106 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 143 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 773 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
6. Tanah Seluas 1742 m² di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 50.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **321.000.000**

1. MOTOR, HONDA/AT1121B01 A/T HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA/P5E02R22M1 M/T HONDA CBR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA/KIJANG INOVA 2.4 GM/T MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **71.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.084.900.000
III. HUTANG	Rp.	470.830.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.614.070.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.